

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Bencana alam merupakan salah satu isu sosial global yang paling mendesak di era perubahan iklim saat ini, di mana frekuensi dan intensitas bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor semakin meningkat. Menurut laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC 2022), perubahan iklim telah memperburuk risiko bencana di seluruh dunia, dengan dampak yang mempengaruhi lebih dari 1,7 miliar orang sejak tahun 2000 (wri-indonesia.org.id, 2022). Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur, tetapi juga memperdalam ketimpangan sosial, di mana masyarakat miskin dan rentan di negara berkembang menjadi korban utama. Data dari Global Natural Disaster Assessment Report menunjukkan bahwa pada tahun 2021, bencana alam menyebabkan kerugian ekonomi global mencapai 252.138 miliar dolar AS, dengan Asia Tenggara sebagai salah satu wilayah terdampak terberat (Reliefweb.int 2022).

Pada era global saat ini kapasitas lembaga di tingkat lokal memegang peranan penting dalam upaya mengurangi dampak. Lembaga yang berfungsi secara efektif tercermin dari meningkatnya kinerja organisasi, kemampuan merespon secara cepat, serta kapasitas adaptasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang (Anwar& Hanim., 2025). Perspektif resiliensi komunitas yang dipromosikan *United Nations Office For Disaster Risk Reduktion* (UNDRR) melalui *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* (2015) menunjukkan bahwa penguatan institusi desa atau komunitas berpotensi menurunkan kerugian (undr.org.id 2022). Meski demikian, banyak wilayah di negara berkembang masih menghadapi tantangan berupa lemahnya struktur kelembagaan akibat keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi (Ayala dkk., 2025). Kondisi ini menyebabkan bencana terus berulang dan memperkuat lingkaran kemiskinan serta ketidakstabilan sosial (Riyanto, 2025). Oleh karena itu, perlu melakukan analisis mengenai kapasitas kelembagaan dalam penanggulangan.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi tantangan serius dalam penanggulangan bencana karena letaknya di kawasan cincin api Pasifik (*Ring of Fire*) serta kondisi iklim tropis yang sangat beragam (www.bnbp.go.id). Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa sepanjang 2018–2024 telah terjadi lebih dari 10.000 peristiwa bencana di Indonesia, meliputi gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga erupsi gunung api (data.loka.id 2023).

Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan infrastruktur, tetapi juga korban jiwa, pengungsian dalam jumlah besar, serta kerugian ekonomi yang mencapai ratusan triliun rupiah. Wilayah Sulawesi Selatan termasuk salah satu daerah paling rentan, mengingat posisinya berada pada zona seismik aktif dengan karakteristik topografi berbukit dan garis pantai yang berpotensi terdampak tsunami, gempa, banjir dan kekeringan hingga pada cuaca ekstrim (www.bpbd.sulseprov.go.id). Peristiwa yang menjadi bukti yang terjadi di Sulawesi Tengah dengan bencana gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala pada September tahun 2018. Kejadian ini menewaskan lebih dari 4.000 orang dan menyebabkan kerusakan serius pada infrastruktur yang luas, (www.Tempo.com 2018). Hal ini menjadi contoh nyata pentingnya penguatan sistem tanggap bencana di tingkat lokal.

Dalam konteks ini, desa-desa di Indonesia memainkan peran krusial sebagai unit terdepan dalam penanggulangan bencana (Nurhayati dkk., 2025). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan otonomi luas kepada desa untuk mengelola sumber daya lokal, termasuk dalam mitigasi dan respons bencana. Desa-desa diharapkan dapat membentuk kelembagaan yang kuat, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai yang tertuang di UU Desa pasal 1 angka 4 UU bahwa BPD berfungsi dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan yang dilakukan di Desa (Roza & Arliman, 2018). Namun, kenyataannya, banyak desa di Indonesia masih menghadapi keterbatasan kapasitas kelembagaan, seperti kurangnya sumber daya manusia terlatih, anggaran terbatas, dan koordinasi yang lemah dengan pemerintah tingkat atas (Asrori, 2014). Hal ini diperburuk oleh desentralisasi yang belum sepenuhnya efektif, sehingga terjadi ketimpangan pembangunan misalnya kapasitas pemerintah desa yang belum memadai, kualitas SDM rendah, keterbatasan anggaran, koordinasi yang belum optimal serta diperparah oleh korupsi (Mu'minah & Tjenreng, 2025).

Lebih spesifik lagi, di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, yang rawan akan bencana alam tetapi yang mendominasi adalah banjir, angin puting beliung, kebakaran, dan tanah longsor (Hasan dkk., 2023). Dari beberapa bencana tadi yang paling sering terjadi dan di rasakan masyarakat yaitu bencana banjir yang hampir setiap tahunnya terjadi. Fenomena bencana seperti banjir dan longsor yang sering terjadi akibat topografi berbukit dan curah hujan tinggi selama musim hujan. Kecamatan Tanete Riaja, sebagai salah satu wilayah strategis, memiliki beberapa desa yang rentan, termasuk Desa Lompo Tengah, yang terletak di dataran rendah dengan sungai melintasi wilayahnya.

Secara geografis, Desa Lompo Tengah memiliki karakteristik wilayah yang rentan terhadap banjir karena dialiri sungai utama yang berpotensi meluap, terutama saat musim hujan. Pada penghujung tahun 2024, banjir besar melanda beberapa dusun, diantaranya Ele, Botto-Botto, Bottolampe, Lisu, dan Worongnge (Reformasiakual.com, 2024). Ratusan rumah warga terendam, sehingga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat terganggu. Data BPS pada tabel 1.1 di bawah melaporkan bahwa hampir setiap tahun Desa Lompo Tengah di landa bencana alam (banjir) yang berulang.

Tabel 1.1 Data Kejadian Banjir Desa Lompo Tengah (2020–2024)

Tahun	Jumlah Kejadian Banjir
2020	2 kejadian
2021	1 kejadian
2022	1 kejadian
2023	0 kejadian
2024	1 kejadian

Sumber: Kecamatan Tanete Riaja Dalam Angka (2020-2025)

Kejadian ini menandakan bahwa banjir telah menjadi siklus tahunan di wilayah tersebut. Dampak banjir di Desa Lompo Tengah tidak hanya dirasakan oleh rumah-rumah penduduk, tetapi juga melumpuhkan berbagai fasilitas umum. Sekolah yang terendam banjir mengakibatkan proses pendidikan terhenti, masjid yang tergenang menghambat kegiatan ibadah, serta infrastruktur desa seperti jalan utama dan jembatan penghubung antar dusun mengalami kerusakan (Sindonews.com 2024). Kondisi tersebut semakin memperburuk mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, sosial, maupun pelayanan publik. (Sindosulsel.com, 2024).

Permasalahan banjir pula tidak dapat dilepaskan dari fenomena alam yaitu perubahan iklim yang nyata (Panguriseng dkk., 2024). Adanya peningkatan intensitas hujan serta perubahan pola cuaca mengakibatkan frekuensi dari banjir semakin sulit diprediksi. Bahkan, beberapa tahun belakangan, bencana banjir yang melanda bukan hanya datang dari luapan sungai, akan tetapi dari curah hujan yang ekstrem, melampaui kapasitas drainase yang ada didesa. Tentu kondisi ini menuntut adanya strategi adaptasi baru yang berbasis pada komunitas, sebab masyarakatlah yang pertama kali merasakan dampaknya.

Dampak banjir sangat kompleks karena tidak hanya menyangkut kerugian fisik tetapi juga sosial dan ekonomi. Dari sisi ekonomi, masyarakat kehilangan harta benda, lahan pertanian produktif, hingga akses terhadap sumber mata pencaharian (Dewayani, 2019). Petani sering kali mengalami gagal panen, sedangkan pedagang kehilangan pembeli akibat akses jalan terputus. Dari sisi sosial, banjir menyebabkan terganggunya aktivitas sosial masyarakat terganggu. akibat banjir ini pula masyarakat yang terdampak lebih berfokus menangani tempat tinggal mereka di bandingkan melanjutkan aktivitas sosial. (Arashi dkk., 2024).

Menurut Dewayani, (2019) dampak bencana banjir pada sosial dan ekonomi tentunya saling berkaitan satu sama lain, sebab semakin tinggi tingkat ekonomi pada suatu masyarakat maka semakin rendah tingkat kerentanan ekonominya terhadap dampak banjir, dan tentunya berdampak pada aspek sosial. Pada masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi, biasanya ada lebih banyak biaya untuk membangun infrastruktur tangguh terhadap banjir (Hapsoro & Buchori, 2015). Hal tersebut dapat memperkecil risiko kerugian ekonomi akibat banjir, juga dapat mengurangi dampak sosial yang timbul, seperti trauma psikologis dan gangguan kehidupan sehari-hari (Arashi dkk., 2024). Selain itu, masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang agak lebih tinggi akan cenderung memiliki relasi sosial yang lebih kuat serta akses lebih luas terhadap dukungan dan bantuan dalam situasi darurat, yang dapat memberikan bantuan dalam proses pemulihan pasca-banjir (Hapsoro & Buchori, 2015).

Dalam menghadapi persoalan bencana banjir, pemerintah daerah memiliki peran yang menjadi sangat krusial, tentunya pada kelembagaan yang berwenang dalam urusan kebencanaan, seperti tim tanggap bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sesuai pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, BPBD serta lembaga lokal daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi strategi penanggulangan bencana pada tingkat daerah.

Berdasarkan peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang tertera secara jelas bahwa penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah, tetapi menempatkan desa sebagai fondasi utama ketahanan masyarakat (bnbp.go.id 2012). Oleh sebab itu, aturan ini menjadi landasan kuat yang menunjukkan pentingnya memperkuat kapasitas kelembagaan desa, terutama pada wilayah yang rentan bencana seperti Desa Lompo Tengah. Ketentuan di dalamnya menggambarkan bahwa desa dituntut memiliki struktur organisasi yang tertata, melakukan pelatihan relawan secara berkesinambungan, serta menyiapkan dokumen

penanggulangan bencana sebagai pedoman kerja saat situasi darurat terjadi.

Pada penanggulangan bencana kapasitas kelembagaan desa sangat penting sebab mengacu pada kemampuan desa dalam merencanakan, mengorganisasi, serta melaksanakan fungsi penanggulangan bencana (Buchari dkk., 2017). Hal ini diperkuat oleh penelitian Mulajaya & Christiani, (2024) yang menunjukkan bahwa pembentukan forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan langkah penting dalam pengembangan kapasitas kelembagaan desa tangguh bencana agar mampu merespon ancaman bencana secara terstruktur dan kolaboratif.

Observasi awal memperlihatkan bahwa kapasitas kelembagaan desa dalam penanggulangan bencana di Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Keterbatasan sumber daya manusia serta minimnya sarana pendukung evakuasi menjadi dua hambatan utama yang secara langsung memengaruhi kecepatan dan ketepatan respons saat terjadi bencana. Kondisi ini selaras dengan temuan dalam Laporan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Barru 2022–2026, yang menyebutkan bahwa BPBD Kabupaten Barru masih mengalami kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar kelembagaan, termasuk sarana, prasarana, dan personel. Keterbatasan tersebut berpotensi menghambat kinerja operasional BPBD, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas penanggulangan bencana hingga ke tingkat desa.

Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebutuhan penanganan di lapangan dengan kapasitas kelembagaan yang tersedia saat ini. Berdasarkan data awal, lima dusun di Desa Lompo Tengah terdampak banjir dengan total sekitar 428 rumah yang terendam. Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Dusun Ele : 120 Rumah
2. Dusun Botto-Botto : 80 Rumah
3. Dusun Bottolampe : 90 Rumah
4. Dusun Lisu : 118 Rumah
5. Dusun Woronge : 20 Rumah

Besarnya jumlah rumah terdampak dibandingkan dengan jumlah personel serta fasilitas yang tersedia memperlihatkan beban kerja yang tidak sebanding. Situasi ini sekaligus menegaskan bahwa kapasitas kelembagaan desa dalam tanggap bencana masih perlu diperkuat, baik dari aspek sumber daya manusia maupun penyediaan sarana pendukung evakuasi, agar proses penanganan bencana dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis kapasitas kelembagaan dalam penanggulangan bencana.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mulajaya & Christiani., (2024) yang mengkaji *pengembangan kapasitas kelembagaan dalam program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kabupaten Magelang*. Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan dilakukan melalui pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Desa serta pembentukan Tim Relawan Siaga Bencana yang melibatkan unsur masyarakat, pemerintah, kelompok rentan, hingga perempuan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kelembagaan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan struktur yang jelas, legalisasi organisasi melalui SK Kepala Desa, serta kolaborasi antarwilayah meskipun masih terdapat kendala berupa belum adanya perjanjian kerja sama yang mengikat. Temuan ini memberikan gambaran bahwa penguatan kapasitas kelembagaan membutuhkan kombinasi antara struktur formal, partisipasi publik, dan kemitraan antarinstansi.
2. Penelitian kedua dilakukan oleh (Hilman dkk., (2021) yang berfokus pada *peningkatan kapasitas kelembagaan desa tanggap bencana di Desa Ngabar, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo*. Studi ini menjelaskan bahwa pemerintah desa menghadapi keterbatasan dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terstruktur, karena selama ini mekanisme kebencanaan hanya bergantung pada anggaran APBDes tanpa adanya kelembagaan khusus. Melalui pendekatan penguatan partisipatif, penelitian ini menghasilkan rekomendasi utama berupa pembentukan satuan tugas kebencanaan, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan, serta sinkronisasi anggaran kebencanaan dengan perencanaan desa. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya membutuhkan struktur organisasi, tetapi juga dukungan sumber daya, partisipasi masyarakat, dan koordinasi lintas aktor.
3. Selanjutnya penelitian ketiga oleh Oktari., (2019) mengkaji *Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana* Lam Teungoh, Kabupaten Aceh Besar, dalam rangka pengembangan Desa Tangguh Bencana pasca tsunami 2004. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* yang menekankan peran aktif masyarakat dalam proses pengurangan risiko bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi desa tangguh bencana berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat, menghasilkan

dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), menyusun peta risiko serta peta evakuasi, dan membentuk Forum PRB Desa. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya pelatihan yang melibatkan kelompok perempuan dan pemuda sebagai bagian dari strategi penguatan kapasitas komunitas. Temuan tersebut menegaskan bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh kelompok masyarakat dan memperkuat kerja sama antarpemangku kepentingan.

Penelitian mengenai kapasitas kelembagaan desa dalam tanggap bencana memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaan terletak di fokus kajian yang sama-sama menekankan mengenai pentingnya penguatan kelembagaan pada desa sebagai aktor utama dalam upaya pengurangan risiko bencana. Ketiga penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa struktur organisasi, partisipasi masyarakat, serta kesiapan sumber daya merupakan elemen kunci dalam membangun ketangguhan desa. Sedangkan pada penelitian ini memiliki perbedaan dari sisi konteks dan lingkup kajian. Jika penelitian terdahulu membahas mengenai pengembangan kelembagaan pada daerah di Magelang, Ponorogo, dan Aceh Besar, maka penelitian ini berfokus pada kondisi kelembagaan Desa Lombo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, yang masih menghadapi kendala lebih mendasar seperti keterbatasan SDM, dan minimnya sarana evakuasi.

Berdasarkan pemaparan dan penelitian sebelumnya penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih jauh mengenai kapasitas kelembagaan dalam tanggap bencana yang ada di Desa Lombo Tengah. Untuk itu rumusan masalah peneliti ini adalah “sejauh mana kapasitas kelembagaan dalam tanggap bencana di Desa Lombo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru”.

I.2 Tinjauan Teori

1.2.1 Teori Kapasitas Kelembagaan

Menurut Buchari dkk., (2017) kapasitas kelembagaan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan seluruh elemen organisasi yang mencakup sumber daya manusia, sosial, ekonomi, budaya lingkungan, struktur organisasi serta sistem kelembagaan yang digunakan agar mampu berjalan secara terpadu untuk mencapai tujuan. Selain itu Riyadi., (2006) berpendapat bahwa pengembangan kapasitas pada suatu lembaga mesti dimulai dari pengembangan kapasitas individunya, baik kapasitas secara makro organisasi maupun pada sistem yang digunakan di suatu lembaga. Menurut (Ratnasari dkk., 2013) *capacity building* dapat di maknai sebagai proses dalam membangun Individu, organisasi maupun kelompok.

Kapasitas kelembagaan merujuk pada kemampuan lembaga untuk mencapai tujuan melalui pengelolaan sumber daya secara efektif, termasuk dimensi *investing in human, organization, dan network* (Eade, 1997). Dimensi *investing in human* menekankan kualitas SDM dan sarana prasarana. Sedangkan *investing in organization* meliputi program kerja dan evaluasi kinerja. *Investing in network* membangun kolaborasi lintas sektor untuk respons bencana yang terkoordinasi.

Dari beberapa konsep kelembagaan menurut para ahli dapat dipahami bahwa, ketahanan suatu institusi sangat bergantung pada bagaimana lembaga tersebut dirancang, dikelola, serta diberi kewenangan dalam merespons ancaman dengan efektif. Bencana tidak hanya dilihat sebagai kejadian fisik semata, tetapi menjadi gangguan besar yang menguji kapasitas kelembagaan, kualitas pengambilan keputusan, serta distribusi kekuasaan yang menopang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tata kelola bencana yang efektif menuntut adanya pengaturan kelembagaan yang kuat, mekanisme pengambilan keputusan yang adaptif, serta pembagian kewenangan yang jelas agar respons dapat berjalan cepat, terarah, dan terkoordinasi dengan baik (Khafian, 2023)

Sejalan dengan perspektif tersebut, untuk menganalisis kapasitas kelembagaan desa dalam tanggap bencana peneliti menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Woodall. dkk., (2024) yang mengidentifikasi empat elemen utama kesiapan kelembagaan untuk tanggap bencana, yaitu *Institutional Arrangement, Decision-Making System, Power Distribution (Policymaking), Cultural Dimension*. Keempat elemen ini memberikan dasar untuk menganalisis sejauh mana sebuah institusi mampu membangun ketahanan dan beradaptasi ketika menghadapi peristiwa bencana yang berskala besar atau tidak terduga.

1. *Institutional Arrangement* (Tata Pengaturan Kelembagaan)

Elemen ini merujuk pada struktur formal dan informal, aturan, serta pola organisasi yang menentukan bagaimana suatu institusi beroperasi dalam tata kelola bencana. Pengaturan kelembagaan membentuk pembagian tanggung jawab, mekanisme koordinasi, serta cara institusi membangun kapasitas preventif, antisipatif, absorptif, adaptif, dan transformatif. Elemen ini menggambarkan “aturan main” yang mengarahkan perilaku aktor dan menentukan seberapa stabil atau adaptif suatu sistem ketika menghadapi guncangan.

2. *Decision Making System* (Sistem Pengambilan Keputusan)

Sistem ini menjelaskan bagaimana institusi membuat keputusan sebelum, saat, dan setelah bencana, termasuk kemampuan untuk menilai risiko, menerapkan prosedur yang konsisten, dan bertindak secara kolektif. Sistem pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh karakter institusi seperti preferensi perencanaan jangka

panjang, norma sosial yang melekat, serta kemampuan menyeimbangkan antara respons cepat dan pengurangan risiko jangka panjang. Sistem yang baik memungkinkan institusi mengantisipasi bahaya, mengoordinasikan respons, dan menjalankan strategi ketahanan secara efektif.

3. *Power Distribution /policymaking* (Distribusi Kekuasaan Dalam Kebijakan)

Bagian ini menggambarkan bagaimana kewenangan dan kapasitas pembuatan kebijakan didistribusikan di antara berbagai aktor dan tingkatan pemerintahan dalam tata kelola bencana. Ini mencakup sejauh mana tanggung jawab terpusat atau terdesentralisasi, bagaimana berbagai aktor mempengaruhi proses kebijakan, serta bagaimana konteks sosial, politik, dan institusional membentuk keputusan tersebut.

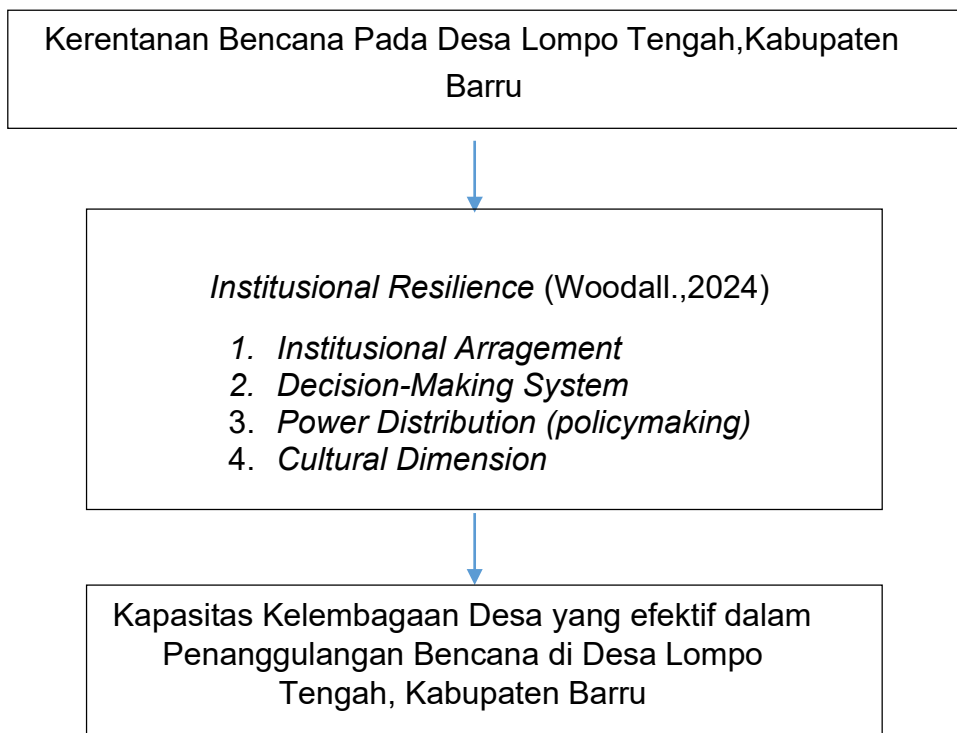
4. *Cultural Dimension*

Bagian ini menjelaskan bagaimana nilai-nilai budaya, norma sosial, kepercayaan, serta kebiasaan masyarakat mempengaruhi cara mereka memahami, merespons, dan berpartisipasi dalam kebijakan penanggulangan bencana. Dimensi budaya juga mencakup bagaimana kearifan lokal (*local wisdom*) digunakan dalam menghadapi risiko bencana, serta bagaimana budaya gotong royong dan solidaritas sosial berperan dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep Woodall dkk. (2024) dengan berfokus pada empat elemen kapasitas kelembagaan dalam menganalisis kapasitas kelembagaan Desa Lompo Tengah dalam tanggap darurat bencana banjir. Keempat elemen tersebut meliputi *Institutional Arrangement*, *Decision-Making System*, *Power Distribution (Policymaking)*, dan *Cultural Dimension*. Keempat elemen tersebut dipilih karena saling melengkapi dalam menjelaskan kapasitas kelembagaan pemerintah desa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. *Institutional Arrangement* digunakan untuk menganalisis bagaimana struktur organisasi, aturan, serta mekanisme kerja kelembagaan dibentuk dan dijalankan dalam penanganan bencana. *Decision-Making System* digunakan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan, koordinasi, serta respons kelembagaan dalam menghadapi situasi darurat. *Power Distribution (Policymaking)* berfokus pada pembagian kewenangan, peran, serta tanggung jawab antaraktor dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat desa. Sementara itu, *Cultural Dimension* digunakan untuk memahami bagaimana nilai-nilai, norma, kebiasaan, dan budaya gotong royong masyarakat berkontribusi dalam mendukung efektivitas kelembagaan desa pada saat tanggap darurat bencana. Penggunaan keempat elemen tersebut bertujuan agar analisis kapasitas kelembagaan tidak hanya menitikberatkan pada

aspek struktural dan administratif, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial budaya yang memengaruhi kemampuan kelembagaan dalam merespons bencana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kapasitas kelembagaan Desa Lombo Tengah dalam tanggap darurat bencana banjir. Penerapan keempat elemen tersebut kemudian dituangkan ke dalam kerangka berpikir penelitian sebagai berikut.

Gambar 1.1 Konsep Kerangka Pikir



1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas kelembagaan Desa Lombo Tengah Kecamatan Tanete Riaja dalam penanggulangan bencana melalui empat elemen ketahanan institusional, yaitu *institutional arrangement*, *decision-making system*, *power distribution (policymaking)*, *Cultural Dimension*. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pengaturan kelembagaan, proses pengambilan keputusan, pembagian kewenangan, serta nilai-nilai budaya yang dijalankan oleh pemerintah desa dalam menghadapi risiko bencana dan melindungi masyarakat.

A. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian tata kelola bencana berbasis komunitas di tingkat desa.

2. Akademis

Sementara itu, secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti isu serupa, baik dengan fokus wilayah maupun pendekatan yang berbeda.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah kumpulan berbagai pendekatan yang bertujuan menganalisis dan memahami secara komprehensif signifikansi yang dikaitkan oleh individu atau kolektif terhadap isu-isu yang dianggap sebagai kemanusiaan atau sosial (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini dianggap paling tepat karena dapat memberikan gambaran secara mendalam mengenai realitas tata kelola serta kemampuan lembaga dalam penanggulangan bencana.

2.2. Desain Penelitian

Penelitian ini menerapkan desain penelitian studi kasus, dimana studi kasus yang dimaksud adalah tentang kapasitas kelembagaan desa dalam tanggap bencana banjir di Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Menurut Creswell & Creswell, (2018) studi kasus merupakan sebuah strategi penelitian kualitatif di mana peneliti menelaah secara mendalam suatu kasus yang dapat berupa program, kejadian, aktivitas, proses, atau individu. Studi kasus digunakan ketika peneliti ingin memperoleh pemahaman yang mendetail mengenai suatu fenomena tertentu dalam konteks kehidupan nyata. Pendekatan ini menekankan eksplorasi mendalam dengan menggunakan berbagai sumber data seperti wawancara, observasi, dan dokumen, sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai fenomena yang diteliti.

Penelitian ini menerapkan desain penelitian studi kasus, di mana studi kasus yang dimaksud adalah mengenai kapasitas kelembagaan desa dalam tanggap bencana banjir di Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Menurut Creswell & Creswell (2018), studi kasus merupakan salah satu strategi dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk menelaah secara mendalam suatu kasus yang dapat berupa program, kejadian, aktivitas, proses, maupun individu. Pendekatan ini digunakan ketika peneliti ingin memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Melalui pendekatan studi kasus, peneliti dapat mengeksplorasi fenomena secara lebih detail dengan memanfaatkan berbagai sumber data, seperti wawancara,

observasi, dan dokumentasi. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang utuh, kontekstual, dan mendalam mengenai kapasitas kelembagaan desa dalam menghadapi bencana banjir.

Pemilihan Desa Lompo Tengah sebagai lokasi studi kasus didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, desa ini merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerentanan terhadap bencana banjir, sehingga relevan untuk dikaji dalam konteks kapasitas tanggap bencana. Kedua, adanya pengalaman empiris desa dalam menghadapi kejadian banjir sebelumnya menjadikan Desa Lompo Tengah sebagai kasus yang representatif untuk memahami bagaimana kelembagaan desa berperan dalam situasi darurat. Ketiga, desa ini dinilai memiliki dinamika kelembagaan yang menarik untuk diteliti, khususnya terkait koordinasi antar perangkat desa, partisipasi masyarakat, serta keterlibatan pihak lain dalam upaya penanggulangan bencana. Dengan demikian, pemilihan Desa Lompo Tengah diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik nyata kapasitas kelembagaan desa dalam tanggap bencana, serta menjadi pembelajaran bagi desa lain yang memiliki karakteristik serupa.

2.3. Prosedur Penelitian

2.3.1. Penentuan Informan

Pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif lebih dikenal dengan penelitian yang berangkat dari kasus keberadaan individu atau kelompok dalam situasi sosial tertentu. Adapun menurut Taylor dkk., (2016) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun dari lisan orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menekankan pemahaman makna yang diberikan oleh orang terhadap pengalaman hidup mereka, dilakukan secara induktif, holistik, dan berupaya memahami realitas dari sudut pandang partisipan.

Dalam pemilihan informan yang berhubungan dengan penelitian ini, peneliti memilih informan yang tentunya paham terkait apa yang menjadi permasalahan oleh peneliti. Berikut informan yang dipilih pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Kelompok Pemerintah (3 Orang) terdiri dari :

- a. Perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barru
- b. Kepala Desa Lompo Tengah
- c. Pejabat Struktural Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja

2. Kelompok Masyarakat (2 Orang) terdiri dari :

- a. Ketua/Tim Tanggap Bencana Desa Lompo Tengah
- b. Tokoh Masyarakat Desa Lompo Tengah

2.3.2. Teknik Pengumpulan Data

Creswell & Creswell (2018). mengungkapkan bahwa peneliti turun langsung ke lapangan agar dapat mengamati perilaku dan aktivitas di lokasi penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian diuraikan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung objek, peristiwa, isu maupun fenomena di lapangan. Menurut (Creswell & Creswell, 2018) observasi kualitatif adalah ketika peneliti membuat catatan lapangan mengenai perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Dalam catatan lapangan ini, peneliti mencatat secara tidak terstruktur atau semi-terstruktur (dengan menggunakan beberapa pertanyaan awal yang ingin diketahui peneliti) mengenai aktivitas di lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian serta mencatat segala hal yang berkaitan dengan manajemen bencana banjir di Desa Lompo Tengah. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data yang faktual dan kontekstual mengenai kondisi di lapangan.

Adapun yang menjadi objek observasi dalam penelitian ini meliputi:

1. **Kondisi geografis dan lingkungan desa**, seperti daerah rawan banjir, aliran sungai, serta sistem drainase.
2. **Kesiapan kelembagaan desa**, termasuk peran dan fungsi perangkat desa dalam penanggulangan bencana.
3. **Aktivitas Tim Tanggap Bencana Desa**, terutama dalam upaya pencegahan, penanganan saat banjir, dan pascabencana.
4. **Partisipasi masyarakat**, dalam hal kesiapsiagaan, gotong royong, serta respon terhadap bencana banjir.
5. **Sarana dan prasarana pendukung**, seperti alat evakuasi, tempat pengungsian, dan fasilitas lainnya yang digunakan saat terjadi bencana.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu interaksi yang dilakukan pewawancara untuk mendapatkan suatu informasi dari informan. Wawancara ini dilakukan

untuk memperoleh suatu data atau informasi tambahan yang diperoleh melalui data observasi (Pahleviannur dkk., 2022). Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan mengajukan pertanyaan (wawancara terbuka) sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada penelitian yang sedang diteliti.

C. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, serta elektronik, yang relevan dengan fokus penelitian (Nilamsari, 2014). Dokumen tersebut dapat berupa peraturan, laporan resmi, arsip, catatan, maupun dokumen kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Dalam penelitian ini, studi dokumen dilakukan dengan menelaah data dan dokumen terkait kejadian banjir di Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, termasuk laporan kejadian bencana, kebijakan pemerintah desa, serta dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan manajemen bencana.

2.3.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah kelanjutan dari pengolahan data. Analisis bertujuan dalam membuat penyelesaian serta memberi jawaban dari setiap rumusan masalah yang telah dibuat, juga memberikan kesimpulan maupun saran untuk penelitian selanjutnya. Sesuai yang dikemukakan oleh Creswell & Creswell (2018). Bahwa analisis data kualitatif merupakan proses yang bersifat interaktif, sistematis, dan berlangsung terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Proses analisis tidak hanya dilakukan setelah semua data terkumpul, tetapi berlangsung sepanjang penelitian untuk menemukan pola, tema, dan makna yang terkandung dalam data. Adapun teknik dalam tahapan melaksanakan analisis data yaitu:

- a. Mengorganisasi dan menyiapkan data untuk dianalisis (*organize and prepare the data for analysis*) proses ini mencakup transkripsi wawancara, pemindaian materi secara optik, pengetikan catatan lapangan, pengkatalogan seluruh materi visual, serta pengelompokan dan pengaturan data ke dalam berbagai jenis sesuai dengan sumber informasinya.
- b. Membaca atau meninjau seluruh data (*read or look at all the data*) Langkah awal ini memberikan gambaran umum mengenai informasi yang diperoleh serta kesempatan untuk merenungkan makna keseluruhannya serta apa saja ide-ide umum yang disampaikan para partisipan.

- c. Melakukan pengodean (*coding*) terhadap seluruh data (*start coding all of the data*) coding adalah proses mengorganisasi data dengan cara memberi tanda pada potongan-potongan (teks atau segmen gambar) dan menuliskan sebuah kata yang mewakili kategori di pinggir teks. Proses ini melibatkan pengambilan data teks atau gambar yang dikumpulkan selama pengumpulan data.
- d. Menghasilkan deskripsi dan tema (*generate a description and themes*) menggunakan proses pengodean untuk menghasilkan deskripsi mengenai latar atau orang-orang, serta kategori maupun tema untuk analisis. Deskripsi mencakup penyajian informasi secara rinci tentang orang, tempat, atau peristiwa dalam suatu konteks.
- e. Representasi Tema/Deskripsi (*representing the description and themes*) pada tahap ini penentuan terkait bagaimana deskripsi dan tema akan disajikan dalam narasi kualitatif dapat berupa pembahasan kronologis dari suatu peristiwa. Pendekatan yang paling umum adalah menggunakan uraian naratif untuk menyampaikan temuan analisis.

2.3.4. Uji Validitas dan Reliabilitas Data

a. Uji Validitas

Menurut (Creswell & Creswell, 2018) menegaskan bahwa validitas dalam penelitian kualitatif merupakan upaya sistematis untuk memeriksa akurasi, konsistensi, serta kejujuran temuan dengan menggunakan berbagai prosedur. Uji validitas dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga analisis. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik untuk membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan (Kepala Desa, perangkat desa, BPBD, masyarakat terdampak) dan berbagai metode (wawancara, observasi, dokumentasi).

b. Reliabilitas Data

Reliabilitas dalam penelitian kualitatif diartikan bahwa pendekatan peneliti bersifat konsisten (Creswell & Creswell, 2018). Pada proses ini peneliti menggunakan strategi audit yaitu dengan peneliti mendokumentasikan seluruh tahapan penelitian secara sistematis dan berurutan, mulai dari tahap persiapan hingga penarikan kesimpulan, sehingga proses penelitian dapat ditelusuri kembali secara jelas sehingga pada proses ini dapat memberikan dokumentasi yang jelas terarah, serta lebih memudahkan dalam proses mengaudi